

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Patenggi di Kecamatan Hulu Kuantan

* **Ridho Ramadhani¹, Arif Rahman Hakim²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : ridhoramadhani@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengelola objek wisata Air Terjun Patenggi yang terletak di Kecamatan Hulu Kuantan. Teori yang digunakan adalah teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid (1997) dalam Muhadam Labolo (2010) yang mengklasifikasikan peran pemerintah ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Penelitian ini berlokasi di Air Terjun Patenggi yang terletak di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Patenggi di Kecamatan Hulu Kuantan sebagai regulator masih pasif. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai dinamisator sudah partisipatif, dalam hal ini untuk mempromosikan Air Terjun Patenggi sudah melibatkan peran masyarakat (konten kreator). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator masih pasif karena infrastruktur tidak ada. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi wisata, minimnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran pengelolaan, kurangnya kegiatan promosi dan pemasaran wisata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata menjadi salah satu kendala yang menghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengelola objek wisata Air Terjun Patenggi.

Kata Kunci: Peran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Air Terjun

Abstract

This study aims to examine the role of the Kuantan Singingi Regency Culture and Tourism Office in managing the Patenggi Waterfall tourist attraction located in Hulu Kuantan District. The theory used is the theory of government roles according to Ryaas Rasyid (1997) in Muhadam Labolo (2010) which classifies the role of government into three categories, namely as a regulator, dynamicator, and facilitator. This study was located at Patenggi Waterfall located in Tanjung Medang Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews and documentation studies. The results of the study obtained are the Role of the Kuantan Singingi Regency Culture and Tourism Office in Managing the Patenggi Waterfall Tourist Attraction in Hulu Kuantan District as a regulator is still passive. The role of the Department of Culture and Tourism as a dynamic agent has been participatory, in this case, to promote Patenggi Waterfall, it has involved the role of the community (content creators). The role of the Department of Culture and Tourism as a facilitator is still passive due to the lack of infrastructure. Limited infrastructure and accessibility to tourist locations, minimal supporting facilities and infrastructure, limited management budget, lack of tourism promotion and marketing activities, low community participation, and limited human resources in tourism management are among the obstacles that hinder the role of the Department of Culture and Tourism of Kuantan Singingi Regency in managing the Patenggi Waterfall tourist attraction.

Keywords: Role, Department of Culture and Tourism, Waterfall.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memainkan peran signifikan dalam pengembangan, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Di Indonesia, pariwisata bahkan sering disebut sebagai sektor strategis (Kemenkeu.go.id, 2025) dikarenakan kemampuan untuk menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan wilayah, dan juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan jati diri serta kekayaan alam suatu negara. Komitmen pemerintah dalam mengatur industri pariwisata terlihat melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Wisata merupakan kegiatan perjalanan oleh individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi dan hiburan, yang dilakukan dengan persiapan khusus serta dalam periode waktu tertentu (Batubara, 2023). Objek wisata adalah lokasi yang dikunjungi berkat keindahannya, yang bisa dimanfaatkan untuk beragam aktivitas pariwisata, sebagai tempat bersenang-senang sementara waktu untuk meraih kepuasan, menikmati layanan berkualitas, serta membentuk kenangan indah selama perjalanan wisata (Pariyanti, 2020). Ada beberapa macam bentuk objek wisata yaitu: Wisata alam, Wisata budaya, Wisata sejarah, Wisata religi, Wisata buatan, dan Wisata kuliner.

Kemudian, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, kekuasaan pemerintahan di Indonesia dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu urusan pemerintahan yang absolut, urusan pemerintahan yang konkuren, dan urusan pemerintahan yang umum (Noor, 2023). Pemerintahan absolut menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara (Dunggio, 2024). urusan pemerintahan bersama adalah hal-hal yang pembagiannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kota/kabupaten (Imaduddin et al., 2024). Pariwisata sebagai urusan pemerintahan pilihan memiliki kedudukan strategis karena dapat menjadi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah (Husnah, 2022). pengelolaan pariwisata tidak hanya sekadar upaya melestarikan kekayaan daerah, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat identitas daerah (Dalisawintri et al., 2025).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, dan penguatan daya saing daerah, dengan tetap memegang teguh prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan masing-masing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu, 2022). Tata kelola didefinisikan sebagai kaidah, aturan, susunan, atau sistem yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tindakan atau kebiasaan tertentu dengan upaya dan ikhtiar yang terencana (Raharjo, 2021c). Desa merupakan sebuah miniatur negara (Dr. Darsono et al., 2023). Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Purwanti & Effendi, 2023).

Peran merupakan rangkaian harapan masyarakat terhadap bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan berperilaku dalam situasi tertentu, sesuai dengan status serta fungsi sosial yang dimilikinya (Setyawan & Umamur, 2025). Peran adalah perilaku atau sikap yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, sehingga dapat memberikan pengaruh atau dampak bagi masyarakat (Saronto et al., 2022). Peran pemerintah yang dimaksud menurut (Ryaas Rasyid, 1997) yang juga dimaknai dalam (Labolo, 2023) yaitu: Pemerintah sebagai regulator, Pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah sebagai fasilitator.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam, kekayaan budaya, serta nilai sejarah yang tinggi (Nizar, 2022). Begitu juga, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peluang wisata yang luar biasa. Peluang ini mencakup variasi budaya dan keindahan alam, dengan berbagai tipe objek wisata alam dan budaya yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan, termasuk daya tarik budaya lainnya. Sejumlah lokasi atau tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yang diurus secara langsung oleh pemerintah daerah dan dijadikan sebagai objek wisata penting dengan tujuan untuk menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.
Daftar objek wisata strategis Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2045

No.	Wisata	Alamat	Daya Tarik
1.	Pacu Jalur	Kota Teluk Kuantan	Wisata Budaya
2.	Air Terjun Tujuh Tingkat	Desa Lubuk Ambacang	Wisata Alam
3.	Air Terjun Guruh Gemurai	Desa Kasang	Wisata Alam
4.	Ekowisata Bukit Rimbang Bukit Baling	Kuantan Singingi	Wisata Alam
5.	Danau Mesjid Koto Kari	Desa Koto Kari	Wisata Alam
6.	Danau Kebun Nopi	Desa Bukit Pedusunan	Wisata Alam
7.	Desa Wisata	Desa Koto Sentajo	Wisata Budaya
8.	Wisata Sejarah	Kuantan Singingi	Wisata Budaya
9.	Air Panas Alam	Desa Sungai Pinang	Wisata Alam

Sumber: RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2045

Wisata Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dapat menjadi modal utama dalam memperkuat identitas daerah sebagai destinasi wisata budaya dan alam di Provinsi Riau. Pengelolaan yang terencana, promosi yang maksimal, serta dukungan infrastruktur akan menjadikan destinasi-destinasi tersebut lebih kompetitif dan berdaya saing, mampu memberikan kontribusi PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi PAD sektor pariwisata ini masih tergolong rendah, dan target PAD masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, mengingat Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peluang besar sebagai daerah tujuan wisata baru. Pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum optimal, terlihat dari fakta bahwa hanya satu objek wisata, yaitu Air Terjun Guruh Gemurai, yang berhasil memberikan kontribusi terhadap PAD.

Kecamatan Hulu Kuantan menjadi salah satu kecamatan dengan wisata alam terbanyak. Namun, terdapat perbedaan data mengenai objek wisata di Kecamatan Hulu Kuantan antara RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025–2045 dan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan informasi yang tidak selaras mengenai jumlah dan jenis objek wisata yang sebenarnya ada di Kecamatan Hulu Kuantan. Air Terjun Patenggi tidak termasuk kedalam pariwisata/ objek wisata resmi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh dinas pariwisata. Kondisi ini dapat berimplikasi pada proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata.

Air Terjun Patenggi, yang berada di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan salah satu potensi wisata alam dengan daya tarik yang tinggi. Air Terjun Patenggi, yang terletak sekitar 5 km dari Desa Tanjung Medang, memiliki dua tingkatan—tingkat pertama setinggi 10 m dengan kolam seluas 20 m², dan tingkat kedua setinggi 20 m dengan kolam lebih dari 100 m². Namun, potensi besar ini tidak akan berkembang optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik.

Pengelolaan Air Terjun Patenggi masih menghadapi berbagai kendala. Air Terjun Patenggi belum tersentuh penanganan maupun pengembangan infrastruktur oleh pemerintah daerah seperti fasilitas keamanan, toilet umum, atau fasilitas pendukung lainnya seperti yang juga dialami objek wisata sejenis di Kuansing (KuansingTerkini.com, 2022). Desa Tanjung Medang belum mengelola Air Terjun Patenggi secara mandiri. Terindikasi kurangnya pengawasan terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh pemerintah, sehingga Air Terjun Patenggi mengalami pencemaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk mencatat fakta dan karakteristik suatu kelompok secara sistematis, objektif, dan teliti. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan dapat berubah atau berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga fleksibel dan terbuka. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Informan penelitian dalam penelitian ini yaitu Informan kunci (*key informan*), Informan utama, dan Informan tambahan.

Adapun informasi informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi
2. PJ Kepala Desa Tanjung Medang
3. Masyarakat Sekitar atau Pengunjung Objek Wisata Air Terjun Patenggi
4. Petugas Lapangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis meliputi pembuatan basis data kasus melalui berbagai metode pengumpulan data, baik kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berjalan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Regulator

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan teknis di sektor pariwisata, termasuk pengelolaan daya tarik wisata alam dan destinasi wisata lokal. Selaku regulator, dinas bertanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di destinasi wisata alam seperti air terjun, untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan, fasilitas, layanan, dan pengelolaan lingkungan oleh pengelola. Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai landasan hukum pemungutan retribusi dari pelayanan tempat rekreasi dan sarana olahraga yang dikelola pemerintah daerah. Sasarannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sambil mendukung perawatan dan pengelolaan fasilitas rekreasi serta olahraga agar tetap layak, teratur, dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi tergolong masih kurang maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan objek wisata alam yang ada di kabupaten kuantan singingi yaitu hanya sebesar 3%. Tentunya ini juga berpengaruh pada PAD yang dimiliki kabupaten kuantan singingi, sehingga PAD sektor wisata alam masih tergolong kecil. Peran pemerintah

daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal membuat regulasi atau aturan terkait pengelolaan objek wisata Air Terjun Patenggi yang terbentur pada tidak termasuknya Air Terjun Patenggi sebagai objek wisata unggulan/ strategis kabupaten kuantan singingi sehingga tidak dikelola dengan baik sebagaimana halnya dengan tiga objek wisata yaitu air terjun guruh gemurai, air terjun batangkoban, dan air angek.

Pada faktanya, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih tergolong pasif dalam pengelolaan Air Terjun Patenggi. Hal ini disebabkan karena objek wisata tersebut belum sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan pengelolaan langsung pemerintah daerah, keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, pengelolaan yang masih bersifat swadaya atau melibatkan masyarakat setempat juga menjadi faktor yang membuat keterlibatan pemerintah belum optimal, baik dari segi promosi, pengembangan infrastruktur, maupun penataan kawasan wisata. Di sisi lain, Pemerintah Desa Tanjung Medang sebagai pihak terdepan yang wilayahnya mencakup objek wisata Air Terjun Patenggi juga belum menunjukkan inisiatif dalam menetapkan regulasi atau kebijakan khusus untuk mengelola dan menata kawasan tersebut secara optimal. Ketiadaan aturan yang jelas terkait pengelolaan, pembagian tanggung jawab, serta pemanfaatan potensi wisata menyebabkan pengembangan Air Terjun Patenggi belum berjalan secara terarah dan maksimal.

2. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Dinamisator

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi sebagai dinamisator dalam mengelola Air Terjun Patenggi berkaitan dengan fungsi dinas sebagai penggerak, pendorong, dan pengaktif seluruh potensi serta pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki peran dalam promosi dan pemasaran destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta pengawasan terhadap standar pelayanan dan kelestarian lingkungan. Hingga saat ini belum tersedia anggaran untuk perbaikan infrastruktur maupun pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pelatihan kepada masyarakat. Dalam bidang promosi, dinas dapat memanfaatkan media sosial, website resmi pemerintah daerah, serta mengikuti event atau pameran pariwisata untuk memperkenalkan destinasi kepada masyarakat luas. Promosi Air Terjun Patenggi turut dibantu oleh para konten kreator yang ada di daerah setempat. Bahkan, dinas dapat menyelenggarakan festival budaya atau event daerah untuk menarik kunjungan wisatawan. Namun demikian, khusus untuk Air Terjun Patenggi, dinas belum dapat membantu secara maksimal dalam perbaikan sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang jelas dalam pengelolaannya serta belum masuknya retribusi objek wisata tersebut ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga secara administratif dan anggaran belum memungkinkan untuk dilakukan intervensi pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang aktif dalam mempromosikan Air Terjun Patenggi sebagai salah satu destinasi wisata alam daerah. Tetapi dalam hal mempromosikan Air Terjun Patenggi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi sudah tergolong partisipatif dengan melibatkan peranan para konten creator. Mereka diberi kesempatan untuk mempromosikannya di sosial media. Tentunya hal ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Fasilitator

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi sebagai fasilitator dalam mengelola objek wisata air terjun adalah menyediakan dukungan, kemudahan, dan sarana agar seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan pengelolaan wisata secara efektif dan berkelanjutan. Dinas memfasilitasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung wisata air terjun, seperti akses jalan, papan informasi, fasilitas umum, serta sarana pendukung kenyamanan dan keselamatan pengunjung.

Air Terjun Patenggi seharusnya dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat dikelola secara resmi dan optimal oleh pemerintah. Karena hingga saat ini belum menjadi bagian dari sumber PAD, pengelolaan serta penyediaan sarana dan prasarana di lokasi tersebut belum dapat direalisasikan secara maksimal. Selain itu, belum adanya sistem retribusi yang diterapkan di Air Terjun Patenggi menyebabkan tidak adanya pemasukan yang dapat digunakan untuk pengembangan dan perawatan objek wisata tersebut. Kurangnya timbal balik dan koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyebabkan tidak adanya setoran ke PAD. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sarana dan prasarana guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyediakan fasilitas di Air Terjun Patenggi menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan Air Terjun Patenggi adalah lokasi air terjun yang berada di kawasan perkebunan masyarakat. Kondisi ini memerlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat pemilik lahan, serta pihak terkait lainnya agar pengembangan wisata dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik serta tetap memperhatikan aspek kepemilikan lahan dan keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, keterbatasan anggaran, posisi geografis, status kepemilikan lahan, dan belum adanya dukungan masyarakat terorganisir menjadi faktor utama yang menghambat peran dinas dalam menghadirkan fasilitas memadai di Air Terjun Patenggi.

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi optimalisasi pengelolaan objek wisata Air Terjun Patenggi. Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor penghambat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas Jalan menuju kawasan tersebut masih belum memadai dan sebagian besar berupa jalan tanah yang melintasi area perkebunan masyarakat. Kondisi ini membuat perjalanan menuju objek wisata menjadi cukup sulit, terutama saat musim hujan.
2. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Wisata Beberapa fasilitas yang belum tersedia secara memadai meliputi toilet umum, tempat ibadah, area istirahat pengunjung, lahan parkir yang tertata, serta tempat pembuangan sampah.
3. Keterbatasan Anggaran Pengelolaan
Air Terjun Patenggi belum memberikan sumbangan ke PAD Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk mengelola Air Terjun Patenggi.
4. Kurangnya Promosi dan Pemasaran Wisata
Promosi objek wisata Air Terjun Patenggi masih belum dilaksanakan secara maksimal. Keterbatasan kegiatan promosi membuat destinasi ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, baik di tingkat lokal maupun luar daerah.
5. Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Tingkat keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai potensi ekonomi dari sektor pariwisata serta belum adanya pembinaan yang berkelanjutan

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

SDM yang terlibat masih minim baik dari jumlah maupun kemampuan. Hal ini menyebabkan pengelolaan destinasi belum profesional dan terstruktur.

SIMPULAN

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Patenggi di Kecamatan Hulu Kuantan sebagai regulator masih pasif. Belum ada regulasi atau aturan khusus mengenai pengelolaan Air Terjun Patenggi yang dibuat oleh Disbudpar. Peran sebagai dinamisator sudah partisipatif. Peran sebagai dinamisator atau penggerak dalam hal ini untuk mempromosikan Air Terjun Patenggi sudah melibatkan peran masyarakat (konten kreator). Peran sebagai fasilitator masih pasif. Peran tersebut belum berjalan secara optimal. Dukungan terhadap perbaikan fasilitas seperti akses jalan, sarana kebersihan, tempat istirahat, papan informasi, dan infrastruktur pendukung lainnya masih terbatas dan belum dilakukan. Faktor penghambat Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengelola Air Terjun Patenggi Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi wisata, minimnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran pengelolaan, kurangnya kegiatan promosi dan pemasaran wisata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, D. (2023). *Objek Wisata Multi Plier Effect*. Semarang: Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Dalisawintri, Noor, M., & Irawan, B. (2025). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. Nas Media Pustaka.
- Dr. Darsono, D. M. S., Syakur, A., Nugroho, N. W., Nasir, M., Arifin, M., Nugroho, A. R. D., ... Rahim, I. A. (2023). *Pengantar Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Dunggio, S. (2024). *Buku Ajar : Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah*. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING.
- Husnah. (2022). *Manajemen dan Tata Kelola Lingkungan: Implementasi SDGs dalam KLHS*. Publica Indonesia Utama.
- Imaduddin, M. A., Juliardi, B., Yandi, R., Putri, T. D., Suhariyanto, D., Siallagan, D. Y., ... Sampe, F. (2024). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. CV. Gita Lentera.
- Kemenkeu.go.id. (2025). *Pemerintah Perkuat Ekonomi dan Sosial melalui Sektor Pariwisata*. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/pemerintah-perkuat-ekonomi-pariwisata>
- KuansingTerkini.com. (2022). *Pengunjung Banyak, Sarana Pendukung Objek Wisata Unggulan Kuansing Tidak Memadai*. Diambil dari <https://kuansingterkini.com/berita/detail/9734/2022/05/05/pengunjung-banyak%2C-sarana-pendukung-objek-wisata-unggulan-kuansing-tidak-memadai-?utm>

- Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Nizar, S. (2022). *Esai Intelektual Perspektif Budaya dan Politik - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Noor, M. (2023). *BUKU AJAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Pariyanti, E. (2020). *Objek Wisata Dan Pelaku Usaha*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Purwanti, L., & Effendi, S. A. (2023). *Isu Kontemporer Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ryaas Rasyid, M. (1997). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI)*, PT. Yarsif Watampone Jakarta.
- Saronto, W., POESOKO, W., & WASISTO, S. (2022). *Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setyawan, D., & Umamur, D. (2025). *Kebijakan Publik: Pendekatan Inkremental untuk Adaptasi dan Resiliensi*. Indramayu: Penerbit Adab.